

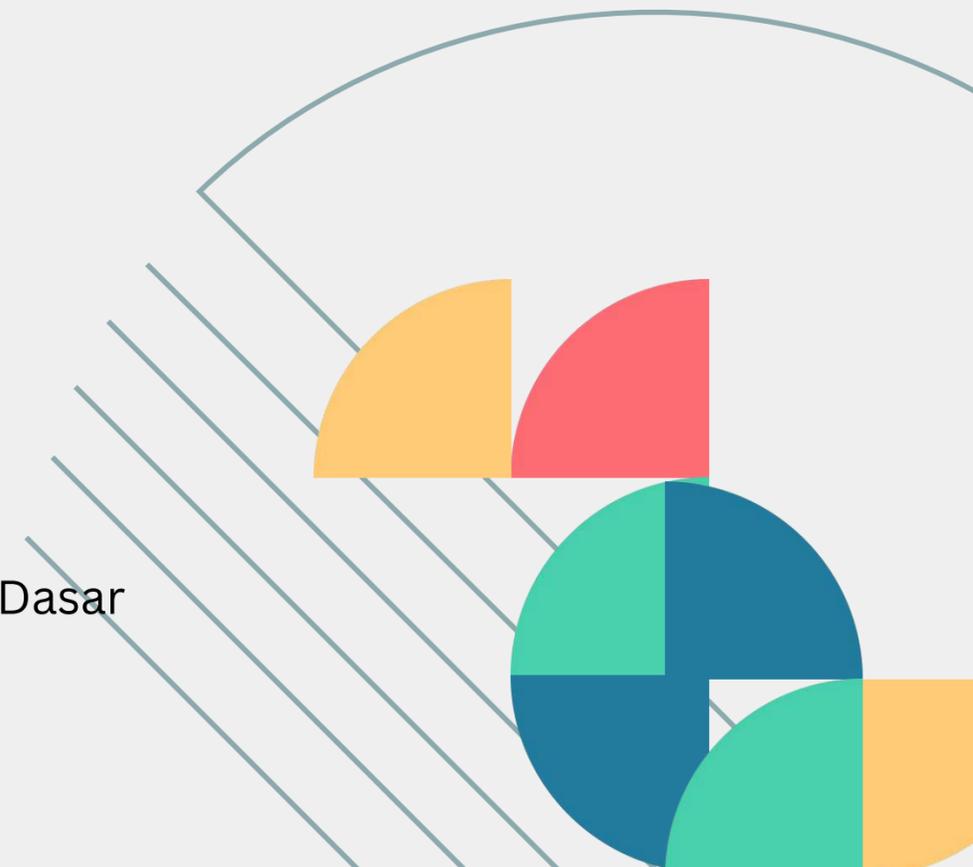
Strategi Pembinaan Inovasi Daerah yang Bersinergi dan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Sosial



Plt Kepala Biro Perencanaan

BUDI SATRIYO, ST., MAP

Webinar Sinergitas Pembinaan Inovasi Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Jakarta, 24 Oktober 2024





#KEMENSOS
Hadir

KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEMENTERIAN SOSIAL

**STRUKTUR ORGANISASI
 KEMENTERIAN SOSIAL RI (PERPRES NO 11)**



MENTERI SOSIAL
WAKIL MENTERI

STAF AHLI

- 1. Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
- 2. Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial
- 3. Bidang Aksesibilitas Sosial

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIS JENDERAL

SEKRETARIAT ITJEN

- BIRO PERENCANAAN
- BIRO KEUANGAN
- BIRO ORGANISASI DAN SDM
- BIRO HUKUM
- BIRO HUMAS
- BIRO UMUM

- INSPEKTORAT BIDANG REHABILITASI SOSIAL
- INSPEKTORAT BIDANG PERLINDUNGAN & JAMSOS
- INSPEKTORAT BIDANG DAYASOS
- INSPEKTORAT BIDANG PENUNJANG

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
 SEKRETARIAT DJEN
 DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK
 DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA
 DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
 DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN BENCANA DAN KEDARURATAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 SEKRETARIAT DJEN
 DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
 DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN NON ALAM
 DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL

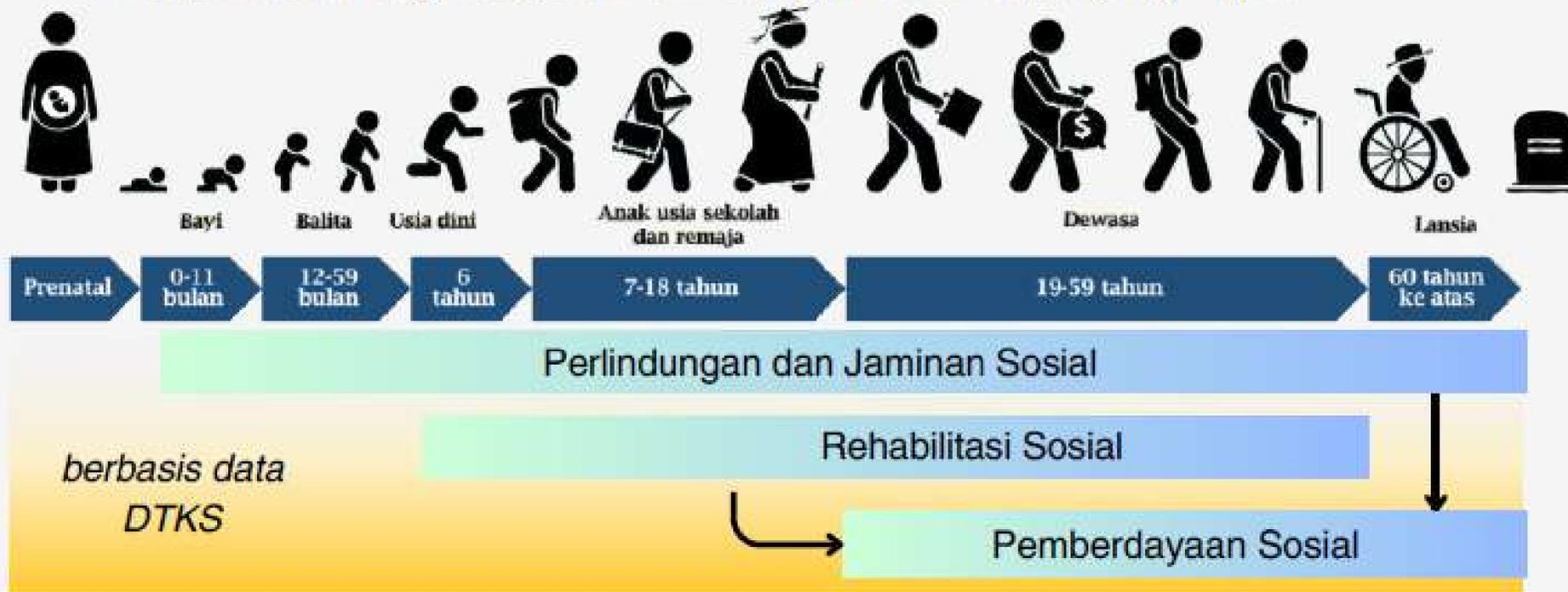
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
 SEKRETARIAT DJEN
 DIREKTORAT KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN KEWIRAUSAHAAN
 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN
 DIREKTORAT POTENSI DAN SUMBERDAYA SOSIAL

PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI
 PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

LANDASAN PARADIGMATIK

Life Course Approach

Sebuah pandangan penting dari Glen H. Elder Jr (1974) yang mengungkap sebuah framework perkembangan individu manusia sepanjang hidup, yang menekankan pentingnya konteks historis dan sosial, serta saling keterkaitan antara antar peristiwa. Dalam konteks pembangunan sosial, pendekatan ini menjadi dasar bagi kebijakan Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat.



- Intervensi kesejahteraan sosial dapat difokuskan pada fase kehidupan awal, agar masa depan dipenuhi oleh generasi pilihan dan meminimalisir masalah sosial;
- Cara pandang menyelesaikan masalah sosial harus disesuaikan dengan masa dimana kehidupan terjadi;
- Pendekatan dapat berbasis keluarga dan komunitas;
- Menanamkan peran dan tantangan sosial baru;

Interdependensi Antar Tahap Kehidupan

Kejadian atau pengalaman pada satu tahap kehidupan (pendidikan di masa kanak-kanak) mempengaruhi kesejahteraan di tahap kehidupan berikutnya (tingkat ekonomi di usia tua).

Pengaruh Sejarah dan Sosial

Kehidupan individu dipengaruhi oleh konteks sosial dan sejarah dimana mereka hidup. Generasi X, Melenial, Gen-Z, mereka yang hidup pada masa covid akan memiliki tantangan berbeda dimasa depan.

Keputusan dan Pilihan Hidup

Keputusan memilih pilihan hidup yang dibuat (berkarier atau berkeluarga) menentukan arah kehidupan.

Timing dalam Peristiwa Kehidupan

Waktu suatu peristiwa (menikah muda, kuliah) berdampak pada peristiwa berikutnya, karena kehidupan tidak akan terulang.

Keterkaitan Individu dan Keluarga

Kehidupan individu terhubung dengan kehidupan keluarga (keputusan orang tua menentukan kehidupan individu anak).

Dinamika Keberlanjutan

Kehidupan individu adalah proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan peran dan tantangan baru sepanjang hidupnya.

"BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Indikator	TARGET	
	2026	2029
Angka Kemiskinan Ekstrem	0%	0%
Angka Kemiskinan	-	<6%
Rumah Layak yang Terbangun/ Terenovasi bagi masyarakat membutuhkan	3.000.000 unit	7.500.000 unit



"Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin."

PROGRAM PRIORITAS: MEMBERANTAS KEMISKINAN

"...pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029"

PROGRAM PRIORITAS: MENJAMIN BUMAH MURAH DAN SANITASI UNTUK MASYARAKAT DESA DAN RAKYAT YANG MEMBUTUHKAN

Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

PROGRAM KERJA 8 MISI ASTA CITA

ASTA CITA 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

- Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sinergi program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan inisiatif dunia usaha dengan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT)
- Pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas program bantuan sosial seperti program pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya melalui program bantuan, pemberdayaan, dan kemitraan.
- Membina dan meningkatkan kualitas penyediaan layanan panti-panti sosial, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat, serta mengembangkan program asistensi sosial lanjut usia (ASLUT).
- Melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, subsidi pupuk, MEKAR, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa

ASTA CITA 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

- Memperkuat manajemen dan peningkatan kualitas SDM para pengelola program kesejahteraan sosial.
- Mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) dari Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarginalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas
- Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum
- Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat
- Memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.
- Mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

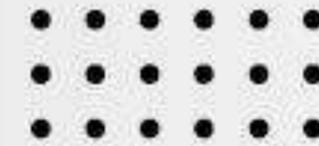
TARGET UTAMA

KEMISKINAN TURUN HINGGA 6% PADA 2029

Sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto dalam Platform Politiknya, dan merujuk pada target pengentasan kemiskinan pada RPJPN. Kemiskinan yang saat ini berada pada angka 9,03% ditarget turun hingga 6% pada 2029.

PEMENUHAN 100% LAYANAN DASAR SOSIAL

Sebagai urusan wajib layanan dasar, Urusan Sosial memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus disediakan Negara pada seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas menjadi target utama.





#KEMENSOS
Hadir

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN SPM BIDANG SOSIAL

PP 2 Tahun 2018 Tentang SPM dan Permensos 9 Tahun 2018 Standar Teknis SPM Bidang Sosial

Jenis Penerima

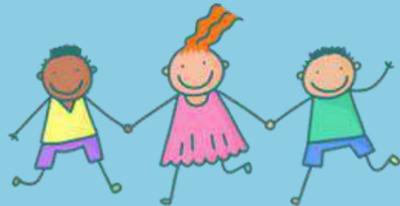
Pelayanan Rehabilitasi Sosial



lanjut Usia Terlantar



Penyandang Disabilitas Terlantar



Anak Terlantar



Gelandangan dan Pengemis

Kewenangan Daerah



provinsi: didalam panti sosial



Kabupaten: diluar panti



dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial

Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial



Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana



Pelayanan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kriteria

STANDAR DAN JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN JASA YANG DITERIMA DI DALAM PANTI MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR:

DISABILITAS TERLANTAR

1. Permakanan
2. Sandang
3. Asrama Yang Mudah Diakses
- 4. Alat Bantu**
5. Perbekalan Kesehatan
6. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
7. Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari
8. Pembuatan NIK
9. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan
10. Pelayanan Penelusuran Keluarga dan/atau
11. Pelayanan Reunifikasi Keluarga

**)disesuaikan dengan kebutuhan penerima layanan berdasarkan asesmen dari Peksos Profesional*

ANAK TERLANTAR

- 1. Pengasuhan**
2. Permakanan
3. Sandang
4. Asrama Yang Mudah Diakses
5. Perbekalan Kesehatan
6. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
7. Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari
- 8. Pembuatan Akte Kelahiran, NIK, dan KIA**
9. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan
10. Pelayanan Penelusuran Keluarga
11. Pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau
- 12. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**

LANSIA TERLANTAR

1. Permakanan
2. Sandang
3. Asrama Yang Mudah Diakses
4. Alat bantu
5. Perbekalan Kesehatan
6. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
7. Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari
8. Pembuatan NIK
9. Akses Ke Layanan Kesehatan
10. Pelayanan Penelusuran Keluarga
11. Pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau
- 12. Pemulasaraan**

GEPENG

1. Permakanan
2. Sandang
3. Asrama/**COTTAG E** yang mudah diakses
4. Perbekalan Kesehatan
5. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
6. Bimbingan Keterampilan dasar
7. Pembuatan NIK,akte lahir, surat nikah dan/atau KIA
8. Akses Ke Layanan Kesehatan
- 9. Pemulangan ke daerah asal**

PADA SAAT TANGGAP BENCANA

1. Permakanan
2. Sandang
3. Tempat Penampungan Pengungsi
4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Dan
5. Dukungan Psikososial

SETELAH TANGGAP BENCANA

1. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Dan
2. Dukungan Psikososial



PROVINSI

STANDAR DAN JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN JASA YANG DITERIMA DI LUAR PANTI MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR:



Data dan Pengaduan



Kedaruratan



Pemenuhan Kebutuhan Dasar:

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR UNTUK DISABILITAS, ANAK, LANSIA, GEPENG

1. Permakanan maksimal 7 hari
2. Sandang
3. Alat Bantu
4. Perbekalan Kesehatan
5. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
6. Bimbingan sosial kepada penerima layanan dan masyarakat
7. Pembuatan Adm Kependudukan
8. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan
9. Pelayanan Penelusuran Keluarga dan/atau
10. Pelayanan Reunifikasi/reintegrasi Keluarga
11. rujukan

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PADA SAAT TANGGAP BENCANA

1. Permakanan
2. Sandang
3. Tempat Penampungan Pengungsi
4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Dan
5. Dukungan Psikososial

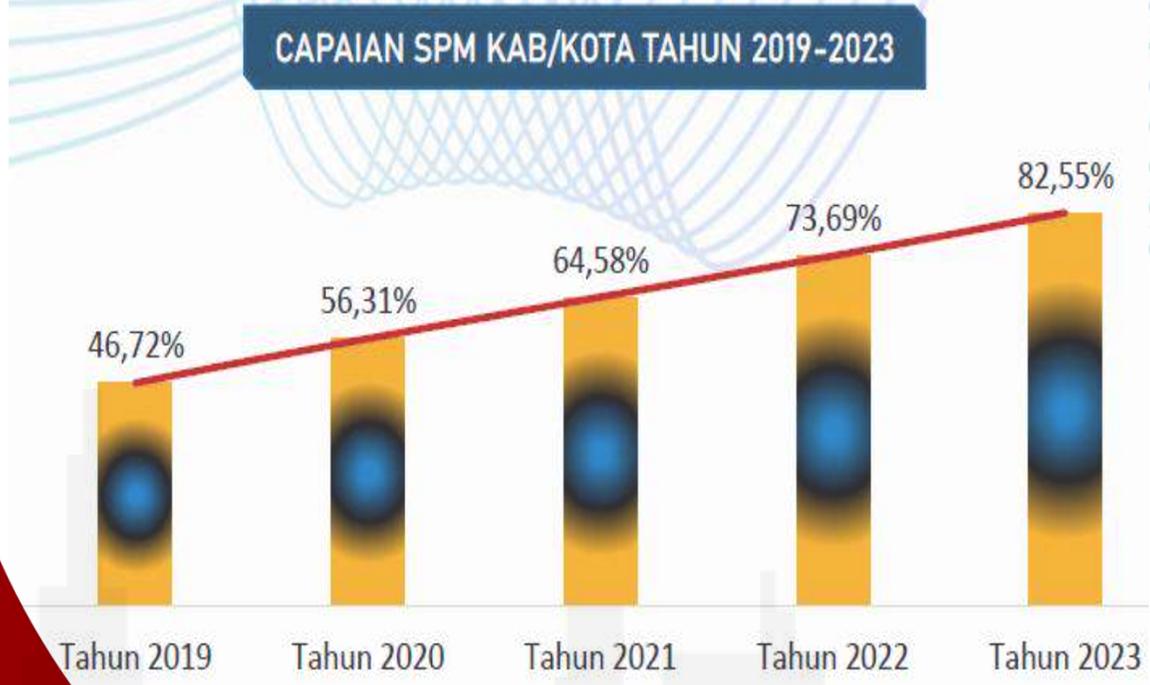
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR SETELAH TANGGAP BENCANA

1. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Dan
2. Dukungan Psikososial



**KABUPATEN/
KOTA**

TREN CAPAIAN SPM NASIONAL



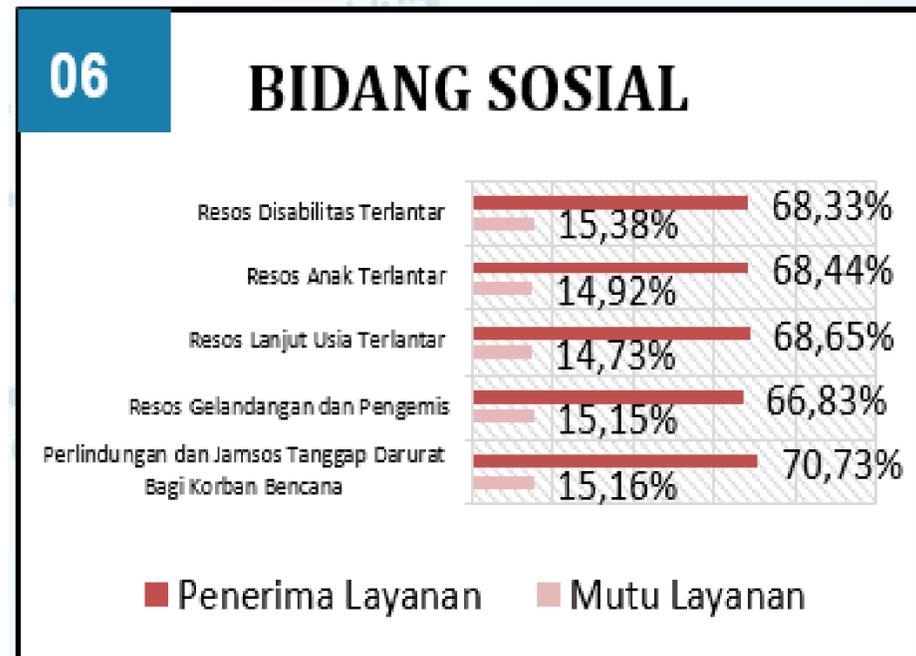
TREN CAPAIAN SPM SOSIAL



PENERIMA DAN MUTU LAYANAN PENERAPAN SPM BIDANG PER INDIKATOR PROVINSI TAHUN 2023



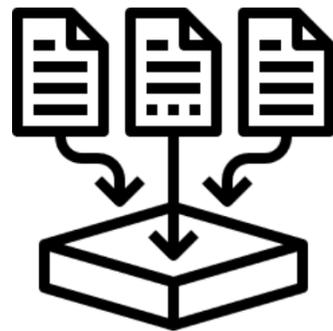
PENERIMA DAN MUTU LAYANAN PENERAPAN SPM BIDANG PER INDIKATOR KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2023



TAHAPAN PENERAPAN SPM

PP 2/2018 tentang SPM

1



**pengumpulan dan
pengelolaan data**

2



**penghitungan
kebutuhan
pemenuhan
Pelayanan Dasar**

3



**penyusunan
rencana
pemenuhan
Pelayanan Dasar**

4



**pelaksanaan
pemenuhan
Pelayanan Dasar**

Permasalahan SPM Bidang Sosial

PENDATAAN/ DATA PENERIMA LAYANAN

1. Penentuan target sasaran masih menggunakan estimasi/perkiraan;
2. Pemerintah Daerah kesulitan dalam melakukan pendataan gelandangan dan pengemis;
3. Masih terdapat daerah yang belum memiliki sumber data yang valid untuk menentukan target penerima layanan

SUMBERDAYA MANUSIA

1. Minimnya recruitment SDM pelaksana (Peksos/Pensos) dalam pelaksanaan SPM;
2. Banyaknya Jumlah SDM Pelaksana yang belum tersertifikasi

KELEMBAGAAN

1. Perencanaan dan penganggaran bidang sosial belum menjadi prioritas kepala daerah;
2. Masih terdapat OPD Bidang Sosial yang tergabung dengan urusan lainnya;
3. Banyaknya Jumlah LKS yang belum terakreditasi

SARANA DAN PRASARANA

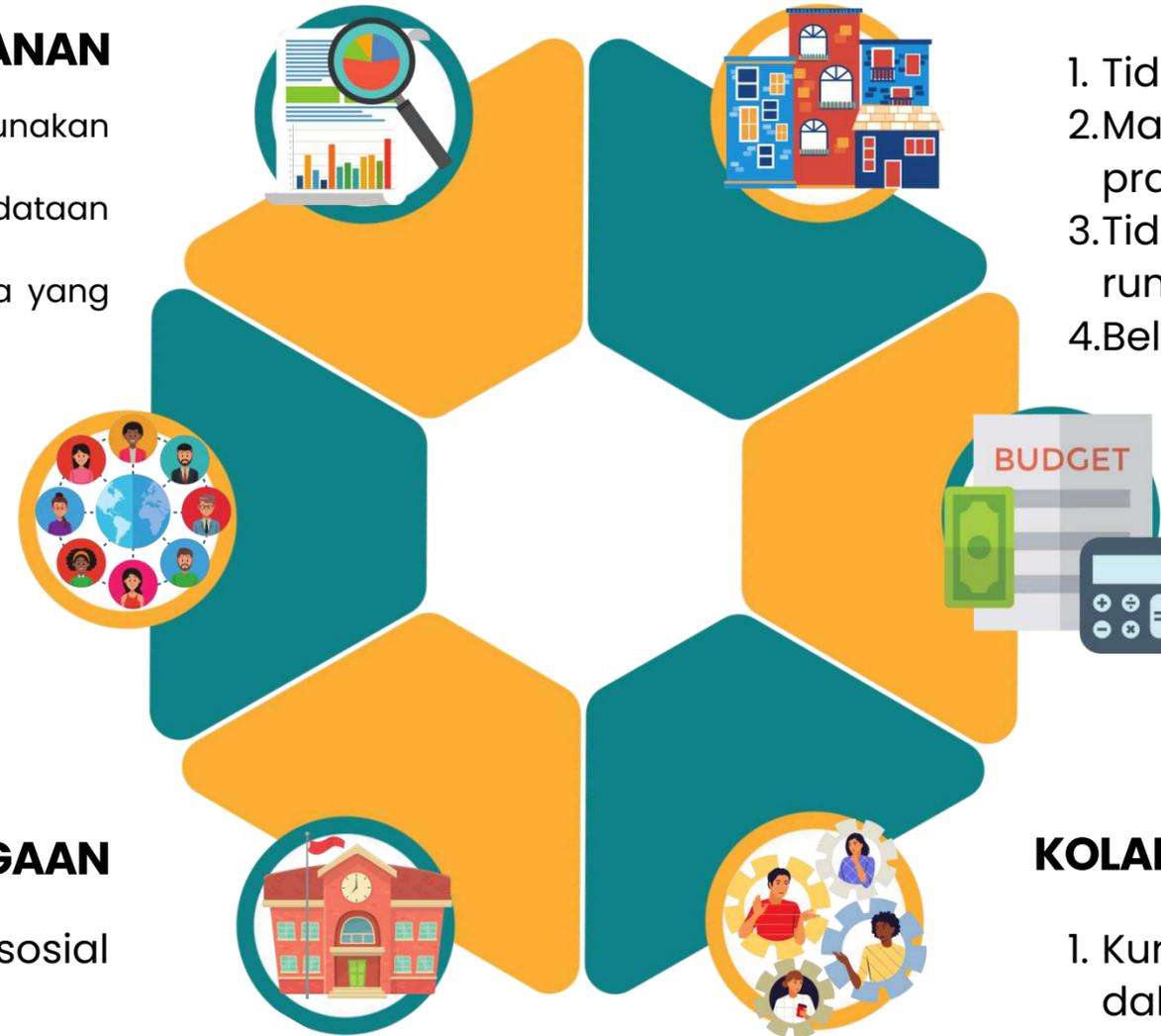
1. Tidak semua provinsi mempunyai panti sosial;
2. Masih banyak panti sosial dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai;
3. Tidak semua kab/kota mempunyai sarana layanan rumah singgah, puskesmas;
4. Belum adanya UPTD Kabupaten/Kota

PENGANGGARAN

Penganggaran SPM Bidang Sosial di daerah masih minim

KOLABORASI DAN SINERGI

1. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar OPD dalam dalam pelaksanaan SPM;
2. Tim Sekretariat Bersama (SEKBER) Daerah belum melaksanakan upaya maksimal antar urusan dalam SPM





#KEMENSOS
Hadir

STRATEGI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR SPM

01. PENDATAAN dan PENGADUAN

PENDATAAN POTENSI SUMBER KESOS
(KARANG TARUNA, DUNIA USAHA, LKS)

PENDATAAN KELOMPOK RENTAN
(PENYANDANG DISABILITAS, ODGJ,
GELANDANGAN)

APLIKASI PENDATAAN PENANGANAN
KEMISKINAN DAERAH

INPUT DAERAH
SISTEM PENDATAAN DAERAH

diintegrasikan pada

PELIBATAN MASYARAKAT PADA PENDATAAN
DAERAH

PUSAT ADUAN/FRONTLINE

PENDATAAN LANGSUNG KE
KELUARGA



PENGELOLAAN DTKS

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

berdasarkan SK Agustus 2024



Jumlah keluarga dalam DTKS
49.983.549
keluarga

Jumlah individu dalam DTKS
136.877.486
jiwa



68.902.158



59.040.086



PBI DTKS
96.800.000
jiwa



PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH)
9.908.916
keluarga
37.003.421
jiwa



PROGRAM SEMBAKO
18.750.419
keluarga
60.521.718
jiwa

✓ **135.565.654 jiwa**
padan data Dukcapil

✓ **partisipasi Pemda**

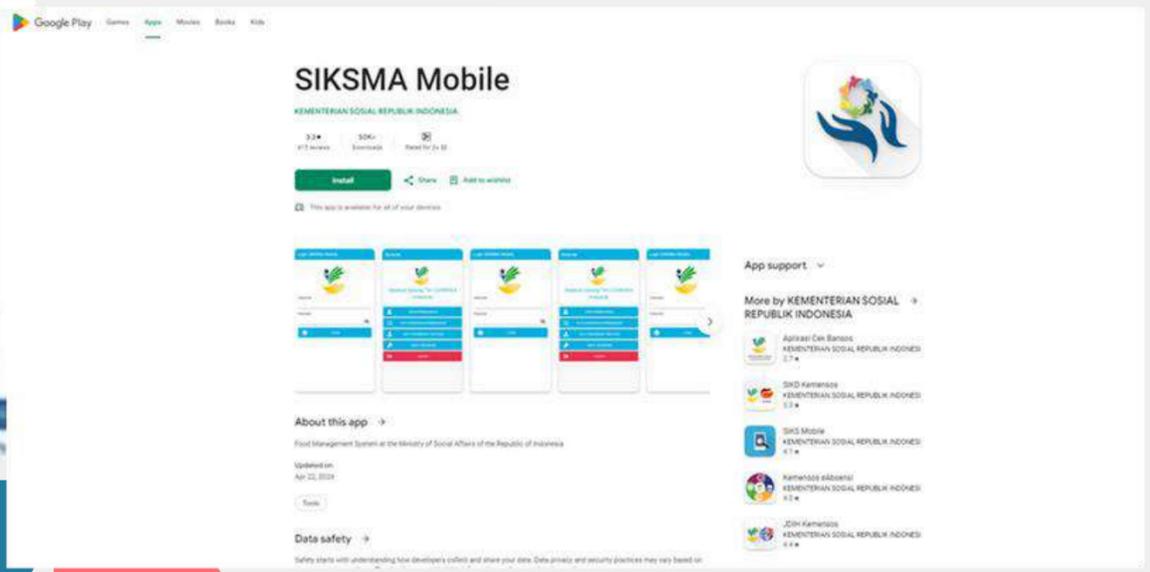
- 50.605.202 data diperbaiki daerah
- 23.868.687 data usulan baru
- 9.442.634 data tidak layak bansos

✓ **cek bansos**
248,57 juta akses
cekbansos.kemensos.go.id sejak
diluncurkan

✓ **usul sanggah**
3.106.504 pengguna terverifikasi

- 1.376.094 usulan disetujui
- 210.096 usulan ditolak
- 43.061 usulan menunggu verifikasi
- 61.183 sanggahan disetujui
- 6.641 sanggahan ditolak
- 104.846 sanggahan menunggu verifikasi

APLIKASI DALAM Mendukung Pendataan, Pengaduan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Command Center (SIKS-CC) merupakan aplikasi berbasis web yang menampilkan daftar pengaduan atau masalah yang berasal dari berbagai macam platform media. Daftar pengaduan tersebut dapat diteruskan (melalui aplikasi ini) kepada pihak-pihak terkait agar segera mendapatkan solusi.

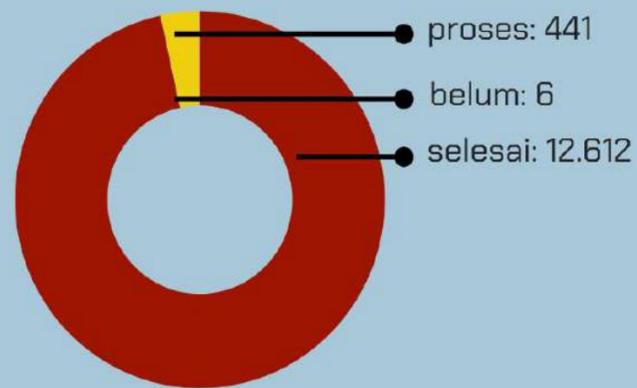
Aplikasi SIKS-CC bertujuan untuk mempercepat penanganan masalah sosial di masyarakat dan sebagai sarana early warning system agar informasi dapat dikelola dengan baik, lebih cepat, dan dimanfaatkan dengan lebih optimal.

- empat jenis pengguna aplikasi SIKS-CC:
- Admin (Mengelola kategori sumber pengaduan dan monitoring user)
 - Operator (Mengelola daftar pengaduan)
 - Informan (Menjawab dan meneruskan pengaduan)
 - Menteri Sosial RI (Melihat dan memantau proses pengaduan)

COMMAND CENTER (021-171) PUSAT KENDALI KEMENTERIAN SOSIAL

Command Center Kementerian Sosial merupakan platform terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola berbagai fungsi dan layanan, antara lain penanganan masalah kesejahteraan sosial, kewaspadaan bencana, asesmen lapangan, pelaporan real-time, serta manajemen masalah sosial yang terpadu, responsif, proaktif, manusiawi, efektif, dan efisien.

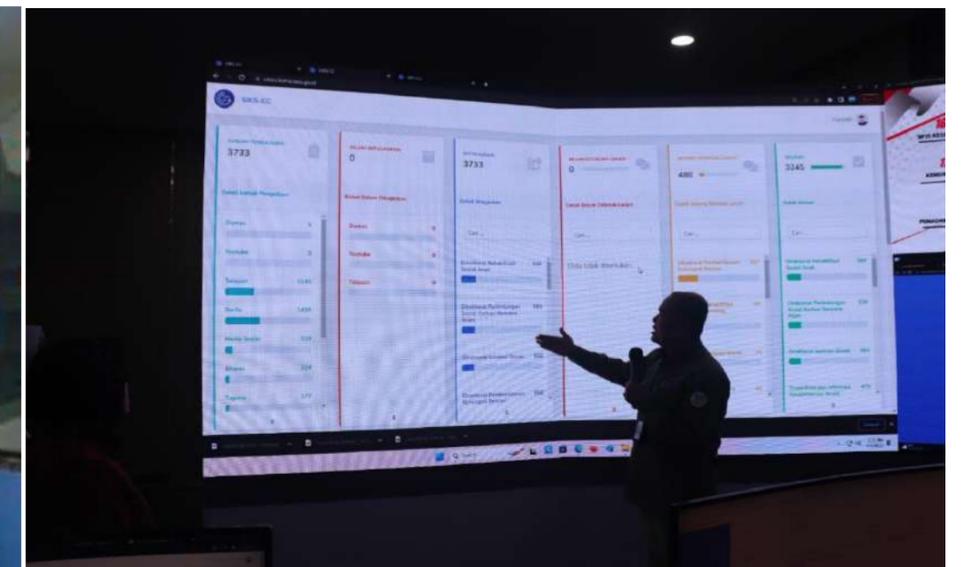
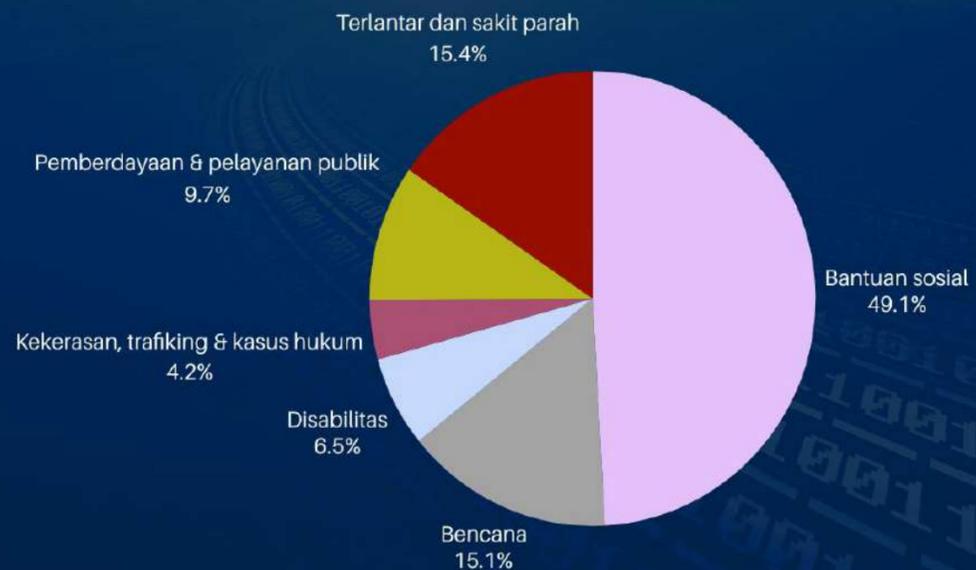
PENANGANAN ADUAN *melalui* COMMAND CENTER



total aduan/kasus 2022-2024
13.059
kasus

call center
171

KATEGORI ADUAN/KASUS



24 hours in 7 days.
FAST RESPONSE to disaster in **10 minutes.**

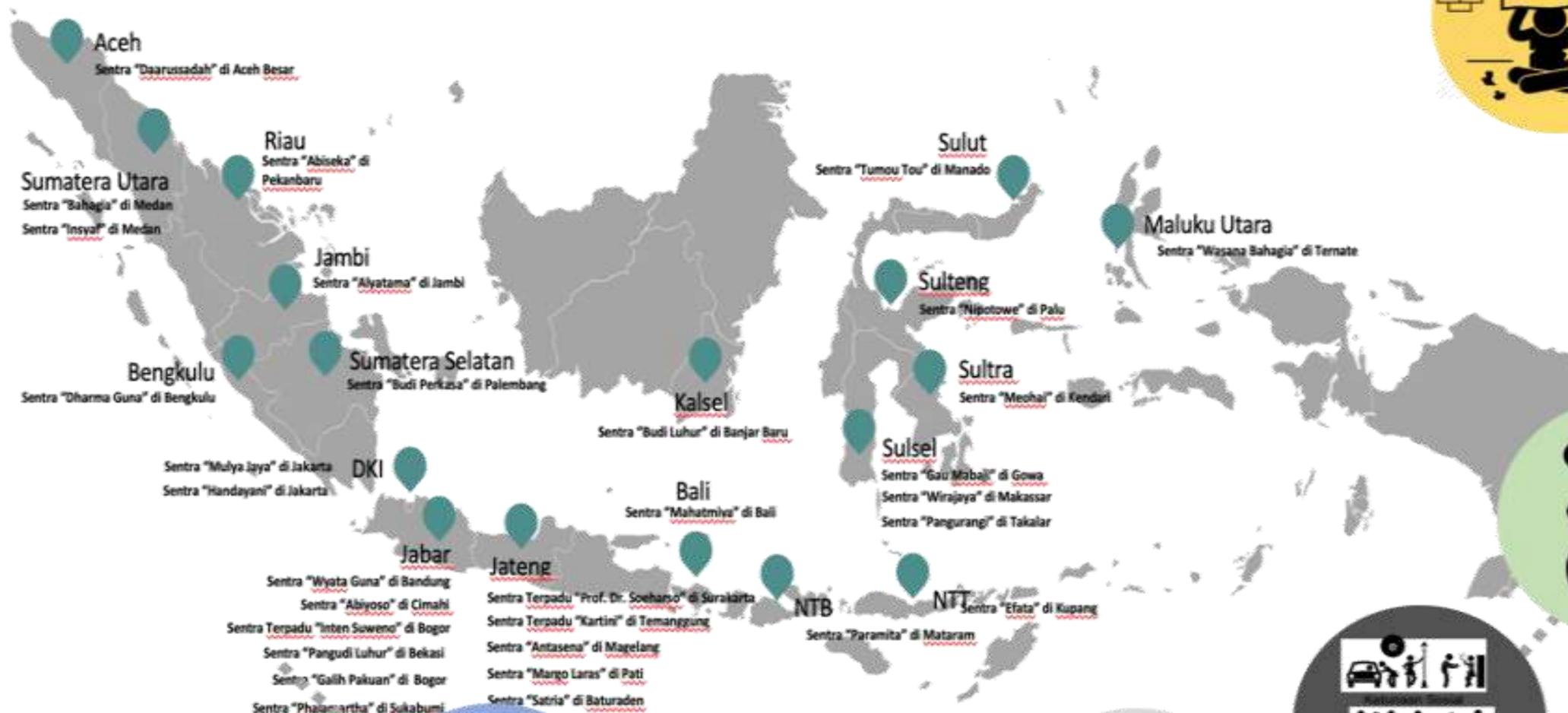
02. KELEMBAGAAN



31 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

7 Masalah Sosial Utama

UU Kesos No. 11 th. 2009, Pasal 5)



MISKIN



TERLANTAR



DISABILITAS



**TUNA SOSIAL DAN
PENYIMPANGAN PERILAKU**

Tuna Susila, Gelandangan,
Pengemis, Eks Narapidana,
Eks Penderita Penyakit
kronis, ODHIV/AIDS
Korban tindak kekerasan
Korban perdagangan orang



**KORBAN KEKERASAN,
EKSPLOITASI, DAN
DISKRIMINASI**



KORBAN BENCANA



TERPENCIL / TERASING

DIMAS PRIAMBODO (22 thn)

Dimas adalah penyandang disabilitas intelektual yang mengikuti Layanan Atensi berbasis Residential selama 2 bulan. Di lingkungan tempat tinggalnya dulu, Dimas cenderung pemalu dan hanya berdiam diri di rumah. Saat ini ia mampu mempromosikan hasil kerajinan Decoupage pada tetangga sekitar, media sosial dan memproduksi secara mandiri berbagai karya kerajinan Decoupage seperti : tas, dompet, tempat tissue, clutch dll.

Dimas mendapatkan bantuan ATENSI berupa modal untuk kewirausahaan Decoupage.

Saat ini Dimas memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.200.000/Bulan dari hasil penjualan kerajinan Decoupage.



Kondisi awal saat belajar Decoupage



Batik Ciprat karya Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Penyandang Dibsailitas Intelektual di Temanggung merupakan inovasi layanan yang ditujukan kepada para Penyandang Disabilitas Intelektual.

Batik tsb merupakan sarana pengembangan layanan dan memberikan manfaat ekonomi dari produksi yang dihasilkan.

Proses Produksi (Perakitan) alat bantu dengan melibatkan para kelompok rentan sebagai bagian dari memberikan akses pekerjaan; PATEN diberikan oleh Kemenkumham untuk alat bantu tongkat adaptif.

KURSI RODA PENYANDANG DISABILITAS



TONGKAT ADAPTIF



MOTOR RODA TIGA UNTUK KEWIRAUSAHAAN



GRITA (Gelang Tuna Grahita)



RUMAH SUSUN (RUSUN) BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)



Kerja sama Kementerian Sosial dengan
Kementerian PU PR



Sentra Mulya Jaya
Jakarta



Sentra Terpadu Pangudi Luhur
Bekasi



Sentra Terpadu dr. Soeharso
Solo



164
PPKS tinggal di rusun

Sentra Kreasi Atensi (SKA)

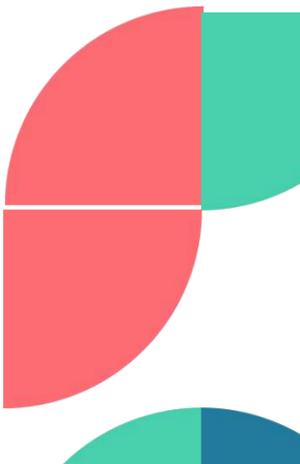
Pusat pengembangan vokasional dan kewirausahaan, serta media promosi hasil penerima manfaat dalam satu kawasan



#KEMENSOS
Hadir



03. KOORDINASI ANTAR LEMBAGA



04. PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pemenuhan Kebutuhan dasar menjadi bagian dari Strategi Kementerian Sosial dalam Mengurangi Beban Pengeluaran. pemenuhan kebutuhan dasar merupakan pemenuhan hak dari setiap warga yang wajib dipenuhi oleh negara melalui pemberian layanan dasar.

pemenuhan Kebutuhan dasar diantaranya untuk pemenuhan sandang, pangan, papan, hak administrasi, dan lainnya.

beberapa program relevan yang dapat dijadikan sebagai inovasi dan diduplikasi bagi daerah sebagai berikut:



Permakanan Penyandang Disabilitas

Pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas tunggal. Diberikan dalam bentuk makanan siap saji, diberikan setiap hari selama 6 (enam) bulan dan terdapat ongkos kirim untuk pengantaran.



Permakanan Lanjut Usia Tunggal

merupakan pemberian makanan siap saji kepada lansia tunggal yang terdapat dalam DTKS, mekanisme pengantaran dan menjadi pintu masuk pada layanan lansia lainnya.



Program Sembako

Pemberian bahan makanan dengan standar gizi tertentu untuk keluarga miskin. Diberikan setiap bulan, sebesar Rp200.000,- target saat ini 18.8 Juta KPM



Program Keluarga Harapan (PKH)

merupakan program pemberian akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial kepada balita, anak sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia. Bantuan Sosial diberikan kepada 10 juta KPM



Rumah Sejahtera Terpadu (RST)

Merupakan program integrasi antar UKE 1, diberikan dalam bentuk renovasi rumah dan di akseskan kepada program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.



Penanganan Korban Bencana

ATENSI

PERMAKINAN LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

TUJUAN:

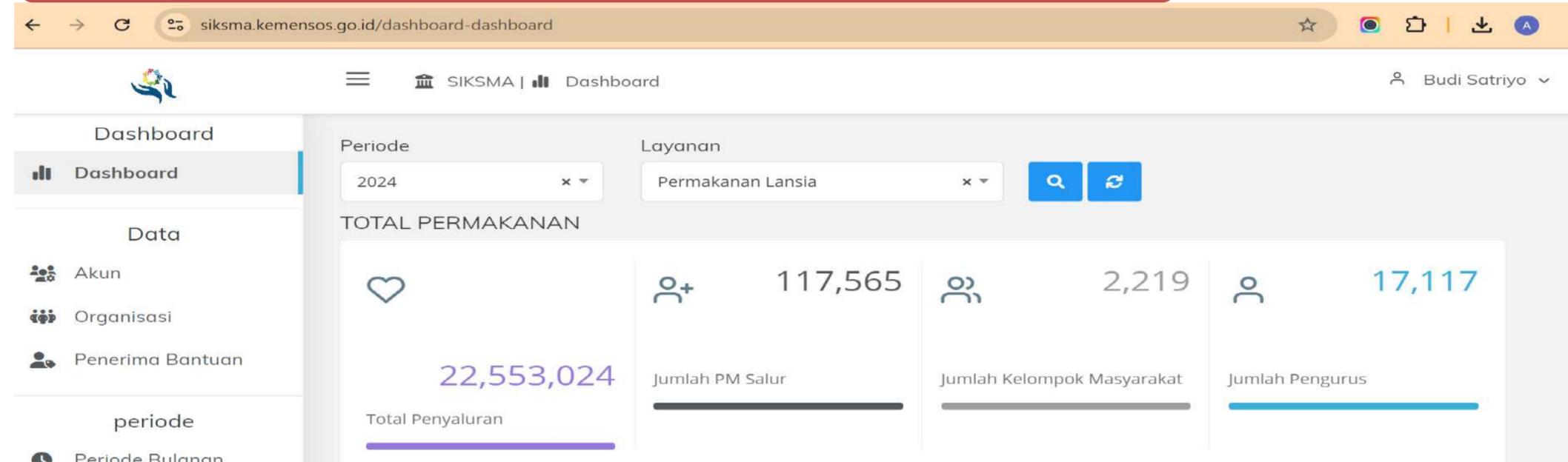
Penghormatan, perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan nutrisi agar memperoleh kehidupan layak dengan indeks Rp30 ribu per orang perhari untuk 2 kali makan,

KRITERIA:

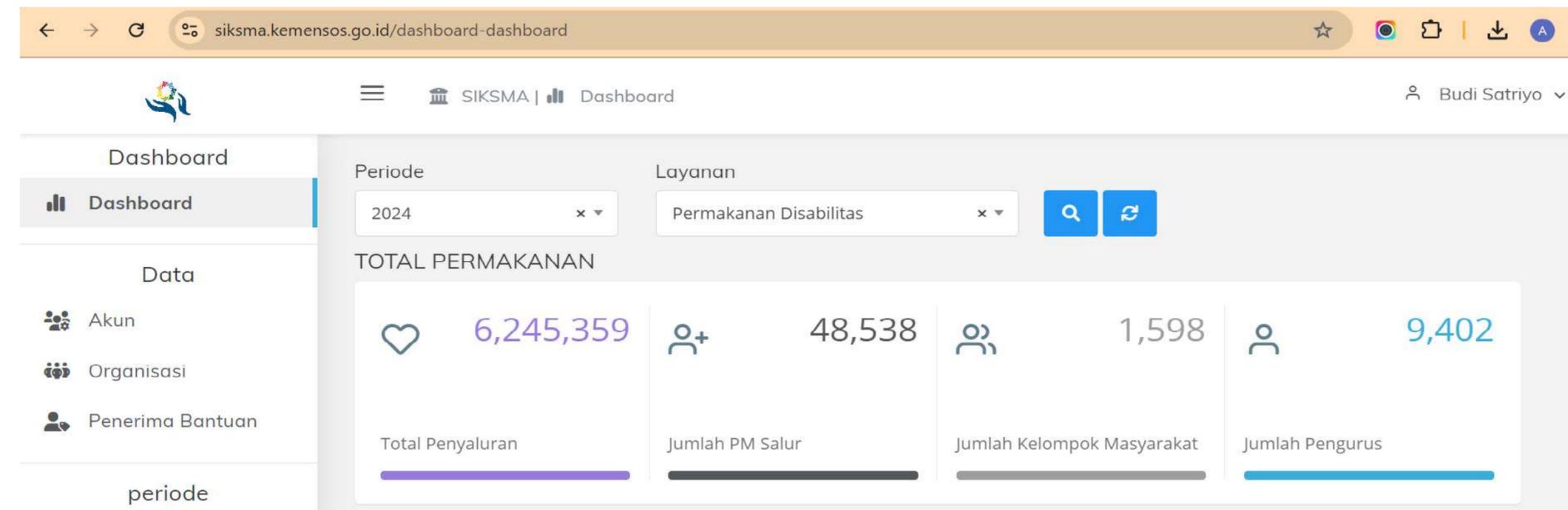
Dari keluarga miskin atau tidak mampu, penyandang disabilitas, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan berstatus sebagai pensiunan istri/suami PNS dan atau purnawirawan TNI/Polri, memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga yang telah dipadankan dengan data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, diusulkan camat atau kepala distrik atau nama lain sebagai penyandang disabilitas penerima bantuan sosial permakinan.

miskin atau tidak mampu, berusia 75 tahun atau lebih, terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS), bukan berstatus sebagai pensiunan istri/suami PNS dan atau purnawirawan TNI/Polri, memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga, diusulkan camat atau kepala distrik atau nama lain sebagai penerima manfaat permakinan.

Dashboard Permakanan Lanjut Usia



Dashboard Permakanan Disabilitas





Permakanan disabilitas:

https://www.youtube.com/watch?v=R_WXEhX8LVw&t=12s



Permakanan lansia

<https://www.youtube.com/watch?v=hngH48yXVZ4&t=152s>

ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI)

Capaian 2014 - 2024



Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial

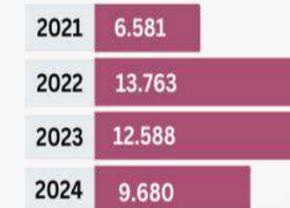


Permakanan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas



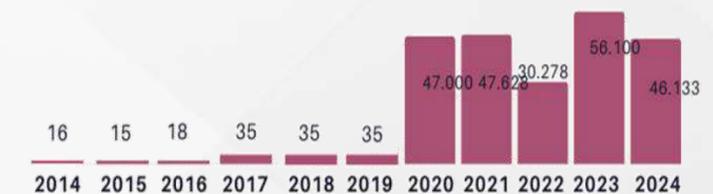
Penyaluran Alat Bantu 2021-2024

42.612
unit



Literasi Khusus bagi Disabilitas Netra 2020 - 2024

227.138
eksemplar



Tahun 2014 - 2019 realisasi merupakan jenis buku, tahun 2020 - 2024 realisasi merupakan jumlah eksemplar buku

PENA DISABILITAS



Merry Maryam, disabilitas fisik penerima PENA usaha makanan.
<https://www.youtube.com/watch?v=O6Nmmw13v5w>



Ibu Salma dan keluarga, disabilitas fisik penerima motor roda tiga untuk usaha.
<https://www.youtube.com/watch?v=oaaE2s6OxN0>



Fandi, disabilitas fisik penerima motor roda tiga untuk usaha.
<https://www.youtube.com/watch?v=15BgrC7EcZU&t=167s>

PELATIHAN VOKASIONAL



PELATIHAN ANYAM TAS PLASTIK BAGI PENYINTAS BENCANA GEMPA CIANJUR

Kementerian Sosial memfasilitasi pelatihan menganyam tas dari bahan plastik sebagai bagian dari *trauma healing* serta memberikan bekal keterampilan.

Salah satu peserta pelatihan, ibu Soraya berhasil menjadi juara 1 lomba Dekranas se-Kab Cianjur.



PELATIHAN PEMBUATAN SANDAL HOTEL BAGI WARGA KAMPUNG BEDENG JAKARTA

Sebanyak 20 orang warga kampung Bedeng mendapatkan pelatihan membuat sandal hotel, dan mendapatkan bantuan pemberdayaan berupa mesin jahit dan bahan dasar sandal hotel. Sandal tersebut akan disalurkan ke perusahaan perhotelan yang telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial.

PELATIHAN VOKASIONAL



PELATIHAN PEMBUATAN BATA INTERLOCK BAGI PENYINTAS BENCANA GEMPA CIANJUR

Kementerian Sosial memfasilitasi pelatihan pembuatan bata interlock sebagai bagian dari *trauma healing* serta memberikan bekal keterampilan. Sudah terdapat toko bangunan yang siap menampung hasil pembuatan bata yang dibuat oleh para penyintas..



PELATIHAN BUDIDAYA JAMUR

Ibu Santina¹⁸ Demotekay, KPM PKH yang mendapatkan pelatihan budidaya jamur. Melalui budidaya jamur tersebut, ia mendapatkan penghasilan tambahan sebesar Rp4—50 ribu per minggu.



RUMAH SEJAHTERA TERPADU (RST)

Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu (R-RST) adalah **program rehabilitasi rumah tidak layak huni** melalui bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas sehingga memenuhi syarat rumah layak huni sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima program, yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dengan memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas penerima program.



**HUNIAN LAYAK BAGI
MASYARAKAT
MISKIN & RENTAN**



76.118

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) 2014 -2021



Rp876,59 M

Realisasi Anggaran

- Indeks 2014 - 2016: Rp10 juta per KPM
- Indeks 2017 - 2021: Rp15 juta per KPM



16.577

Rumah Sejahtera Terpadu (RST) 2022 - 2024

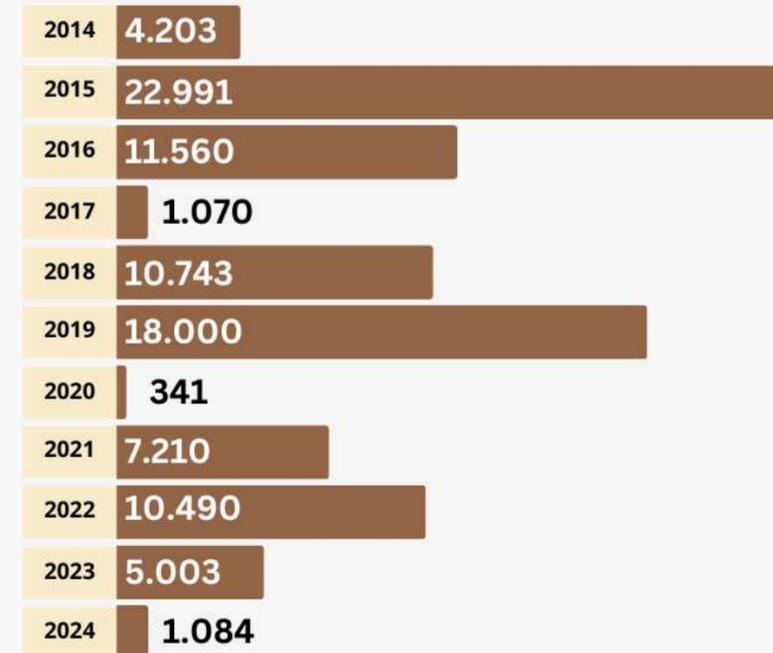


Rp331,54 M

Realisasi Anggaran

- Indeks Rp20 juta per KPM

Realisasi capaian 2014-2024



Realisasi 2024 s.d Agustus 2024

SEBELUM



SESUDAH

TUJUAN RST

- Mengembalikan keberfungsian sosial dari penerima bantuan sosial melalui perbaikan kondisi rumah.
- Meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.
- Meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima bantuan sosial.
- Menumbuhkan nilai-nilai kegotong-royongan, partisipasi, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial di antara penerima bantuan sosial dan warga masyarakat setempat; dan/atau
- Meningkatkan pemberdayaan penerima bantuan sosial melalui penyediaan tempat usaha di dalam rumah.

FASILITAS UMUM DAN LAYANAN DALAM PENANGGAPAN BENCANA



#KEMENSOS
Hadir



1 TENDA PENGUNGSIAN

Satu buah tenda serbaguna mampu menampung 40 orang penyintas. Tenda ini dilengkapi dengan kasur lipat, selimut, kipas angin, sumber listrik, dll



2 POS MEDIS

Terdapat pos medis dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Cugenang dan dibantu oleh Mahasiswa kedokteran



3 POS LDP

LDP atau Layanan Dukungan Psikososial dibuat untuk menghilangkan trauma bagi para penyintas terutama anak-anak



4 LAPANGAN OLAHRAGA

Para penyintas dapat melakukan berbagai macam aktivitas olahraga seperti sepak bola hingga bola voli



5 TEMPAT IBADAH

Satu tenda serbaguna dipergunakan secara khusus untuk tempat beribadah



6 TOILET UMUM

Kemensos memasang toilet portable yang dapat digunakan penyintas untuk urusan



7 DAPUR UMUM

Dapur Umum menjadi fasilitas yang



8 LAUNDRY

Penyintas dapat mencuci baju secara



9 POS AIR BERSIH

Kemensos menyediakan air bersih bagi para penyintas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan



10 DAPUR KREASI

Dapur Kreasi adalah inovasi baru yang dilakukan untuk memberdayakan penyintas dg cara mengajarkan mereka untuk berwirausaha seperti membuka kedai kopi, makanan, dan usaha lainnya



11 LAYAR HIBURAN

Meskipun berada di pengungsian, namun para penyintas tetap dapat menikmati beragam hiburan yang ditampilkan melalui layar hiburan

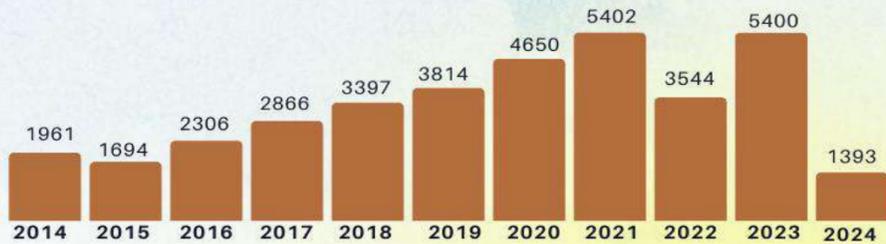


12 SEKOLAH DARURAT

13 PELATIHAN PEMBERDAYAAN

KEJADIAN BENCANA DI INDONESIA 2014 - 2024

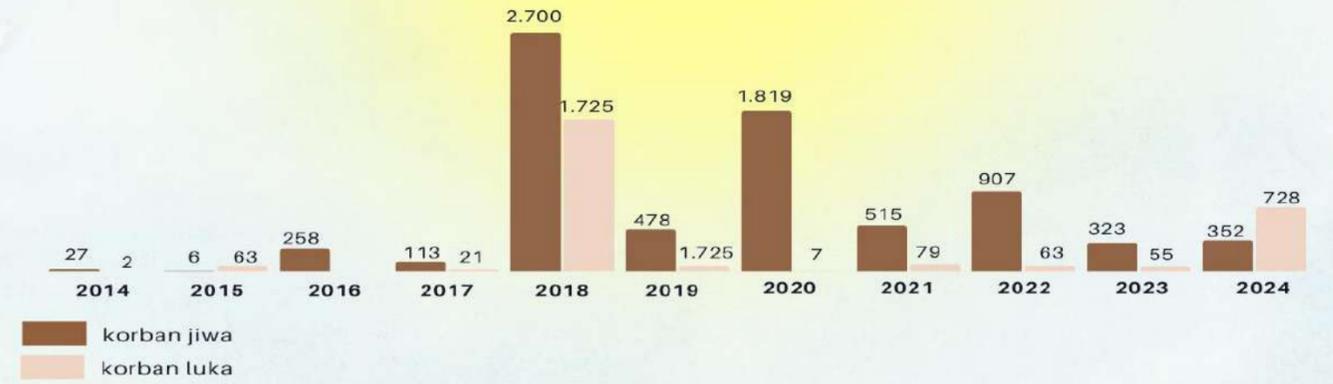
36.427 kejadian bencana dalam kurun waktu 2014-2024



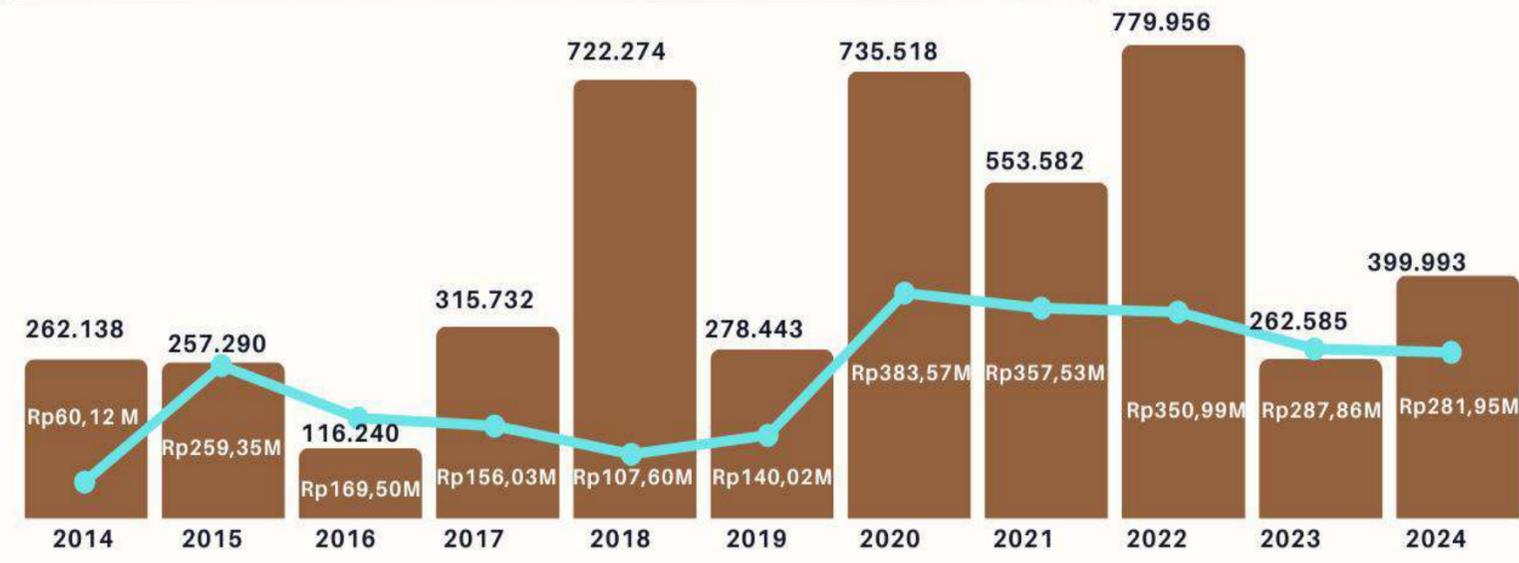
Sumber: GIS BNPB, Pusdalops BNPB & Pusdalops PB Perlinsos

- 1** Covid-19
- 377** Gelombang Pasang & Abrasi
- 543** Kekeringan
- 7.569** Tanah Longsor
- 5.431** Erupsi Gunung Api
- 11.442** Banjir
- 5.431** Kebakaran hutan
- 10.736** Banjir
- 5.431** Gempa Bumi
- 3** Tsunami

7.498 korban jiwa dan 2.804 korban luka 2014 -2024



Realisasi Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar



■ Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (jiwa)
 ● Realisasi anggaran (Milyar Rp)
 Realisasi 2024 s.d Agustus 2024



4.813.840 orang

Korban Bencana Alam Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 2014-2024



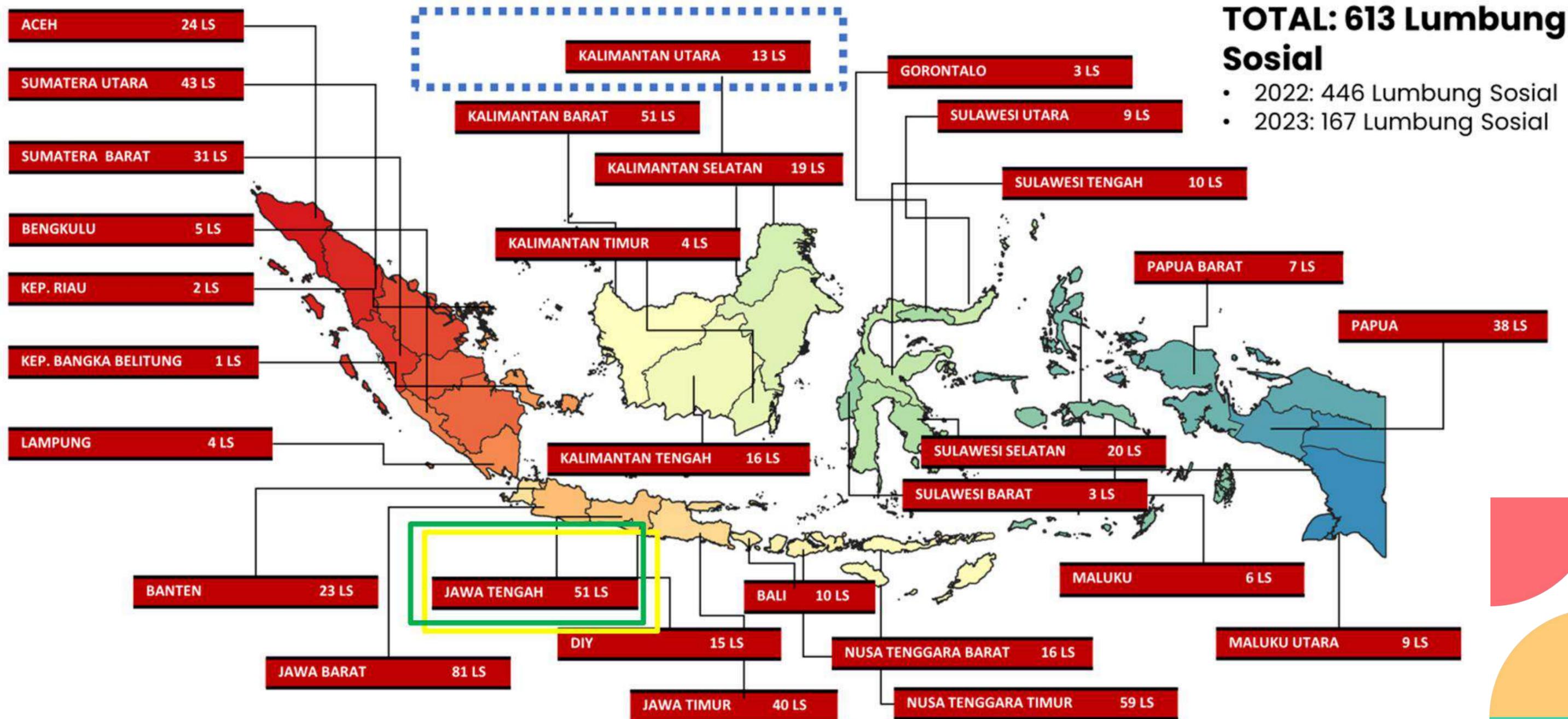
Rp 2.554.538.148.052,-

Realisasi Anggaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam 2014-2024

Fasilitas Umum dan Layanan bagi Korban Bencana

- Tenda Pengungsian
- Pos Medis
- Pos Layanan Dukungan Psikososial (LDP)
- Lapangan Olahraga
- Tempat Ibadah
- Sekolah Darurat
- Toilet Umum
- Dapur Umum
- Laundry
- Pos Air Bersih
- Layar Hiburan
- Pemberdayaan Ekonomi

SEBARAN LUMBUNG SOSIAL



TOTAL: 613 Lumbung Sosial

- 2022: 446 Lumbung Sosial
- 2023: 167 Lumbung Sosial



04. KESIMPULAN & REKOMENDASI

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menjadi salah satu target utama dalam pelaksanaan kebijakan di Kementerian Sosial;
2. Koordinasi dan Kolaborasi menjadi kunci penting pelaksanaan SPM Bidang Sosial. Dukungan Kementerian Sosial melalui program program eksisting telah dilakukan;
3. Komitmen kepala daerah, penganggaran, kelembagaan serta SDM berperan penting dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat melalui SPM Bidang Sosial;
4. Komitmen kepala daerah diwujudkan melalui keberpihakan daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang berada pada Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
5. Alokasi penganggaran di prioritaskan untuk pelaksanaan SPM Bidang Sosial sebagaimana mandat dalam UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah (HKPD);
6. Kelembagaan diwujudkan melalui keberadaan Panti Sosial dan Pembinaan LKS di Provinsi serta keberadaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)/ Shelter/ Rumah Singgah di Kabupaten/Kota dalam melayani Anak, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
7. Kelembagaan penanganan Bencana melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Lumbung Sosial sebagai upaya mitigasi dalam keadaan bencana;
8. Sumberdaya manusia Kesejahteraan Sosial diwujudkan dengan hadirnya dan ter sertifikasinya Pekerja Sosial, Taruna Siaga Bencana, Pelopor Perdamaian;
9. Strategi daerah inovatif pelayanan dasar diwujudkan dengan adanya:
 - a) Keberadaan data Pemerlu Layanan yang valid, melalui data daerah/aplikasi daerah dengan DTKS;
 - b) Program pemenuhan kebutuhan daerah inovatif daerah seperti permakanan, alat bantu, penyiapan sandang maupun logistic bencana, sarana dan prasarana yang handal seperti kendaraan bencana maupun kendaraan operasional mendukung rehabilitasi sosial;
 - c) Koordinasi lintas OPD dalam pelayanan SPM Bidang Sosial,



#KEMENSOS
Hadir

TERIMA KASIH

www.kemensos.go.id

@kemensosri